BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dinas-dinas yang ada di Kota Depok. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur pengaruh transparansi laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti meggunakan metode penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Keuangan di dinas-dinas yang ada di Kota Depok . Peneliti melakukan penyebaran kuesioner dimulai pada bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2018.

Selama penelitian ini, peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 40 kuesioner untuk kuesioner sampel penelitian dan seluruh kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti dengan utuh.

Tabel IV.1
Data Distribusi Sampel Penelitian

	Nama Dinas	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Kembali
1.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok	2	2
2.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	2	2
3.	Dinas Perhubungan Kota Depok	2	2
4.	Dinas Kesehatan Kota Depok	2	2
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok	2	2
6.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok	2	2
7.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok	2	2
8.	Dinas Sosial Kota Depok	2	2
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok	2	2
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok	2	2
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2
12.	Dinas Tenaga kerja Kota Depok	2	2
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok	2	2
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	2	2
15.	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok	2	2
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	2	2
17.	Dinas Pendidikan Kota Depok	2	2
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	2	2
19.	Badan Keuangan Daerah Kota Depok	2	2
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok	2	2
	Total	40	40

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2018.

Tabel IV.2
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	40	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak terisi dan tidak kembali	0	0 %
3	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	40	100%

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2018.

Dari data sampel penelitian sebanyak 40 sampel, peneliti dapat mengolah semua sampel penelitian karena tidak ada yang kurang ataupun menolak untuk menerima penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Keuangan. Data responden ini akan mendeskripsikan mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan masa kerja dari Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Keuangan.

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik ini dilihat dari responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel IV.3

Hasil Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	25	62.5%
Perempuan	15	37.5%
Total	40	100%

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2018.

Pada tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab pernyataan kuesioner yang dibuat oleh peneliti ini lebih didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang dengan persentase 62.5% dan sisanya berjumlah 15 orang dengan persentase 37,5 % adalah responden yang berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Karakteristik ini dilihat dari pendidikan responden yang terdiri dari SLTA, Diploma III (D3), S1,S2 dan S3.

Tabel IV.4
Hasil Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SLTA	0	0 %
D3	0	0 %
S1	30	75 %
S2	8	20 %
S3	2	5 %
Total	40	100%

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2018.

Pada tabel IV.4 menunjukkan karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak dari responden yang menjadi subyek penelitian adalah S1 dengan sebanyak 30 orang dengan persentase 75%, 8 orang tingkat pendidikan terakhir S2 dengan presentase 20% dan 2 orang dengan tingkat pendidikan S3 dengan persentase 5 %.

c. Karakteristik Responden berdasarkan Lama Kerja

Tabel IV.5

Hasil Data Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja	Jumlah Responden	Persentase
<5 Tahun	0	0%
5-10 Tahun	0	0 %
>10 Tahun	40	100 %
Total	40	100%

Sumber: Data primer yang diolah Peneliti, 2018.

Pada tabel IV.5 ini menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan lama kerja yang dialami responden. Lewat karateristik ini dapat kita ketahui bahwa masa kerja responden semuanya telah melebihi 10 tahun kerja.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation. Responden yang menjadi subjek penelitian berkaitan dengan pengujian kuesioner penelitian ini adalah 22 Responden. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 45 butir. Terdiri dari penyataan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebanyak

15 butir, variabel transparansi laporan keuangan 9 butir, variabel penyajian laporan keuangan sebanyak 12 butir dan variabel aksesibilitas sebanyak 9 butir.

Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,444. Item pernyataan dinyatakan valid jika nila $\underline{r}_{hitung}$ > dari r_{tabel}. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian validitas: (Hasil Uji Validitas dengan menggunakan spss bisa dilihat di lampiran 7)

Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas

VARIABEL	BUTIR	R HITUNG	R TABEL	VALIDITAS
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Y1	0.966	0,444	VALID
	Y2	0.966	0,444	VALID
	Y3	0.966	0,444	VALID
	Y4	0.966	0,444	VALID
	Y5	0.966	0,444	VALID
	Y6	0.966	0,444	VALID
	Y7	0.984	0,444	VALID
	Y8	0.984	0,444	VALID
	Y9	0.984	0,444	VALID
	Y20	0.984	0,444	VALID
	Y11	0.984	0,444	VALID
	Y12	0.984	0,444	VALID
	Y13	0.984	0,444	VALID
	Y14	0.984	0,444	VALID
	Y15	0.984	0,444	VALID
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH	X1-1	0.916	0,444	VALID
	X1-2	0.916	0,444	VALID
	X1-3	0.896	0,444	VALID
	X2-1	0.913	0,444	VALID
	X2-2	0.970	0,444	VALID
	X2-3	0.970	0,444	VALID
	X3-1	0.970	0,444	VALID
	X3-2	0.970	0,444	VALID
	X3-3	0.961	0,444	VALID
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	X1-1	0.950	0,444	VALID
	X1-2	0.950	0,444	VALID
	X1-3	0.950	0,444	VALID
	X2-1	0.994	0,444	VALID
	X2-2	0.994	0,444	VALID
	X2-3	0.994	0,444	VALID
	X3-1	0.994	0,444	VALID
	X3-2	0.994	0,444	VALID
	X3-3	0.994	0,444	VALID
	X4-1	0.994	0,444	VALID
	X4-2	0.994	0,444	VALID
	X4-3	0.994	0,444	VALID

VARIABEL	BUTIR	R HITUNG	R TABEL	VALIDITAS
AKSESIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	X1-1	0.368	0,444	TIDAK VALID
	X1-2	0.872	0,444	VALID
	X1-3	0.765	0,444	VALID
	X2-1	0.444	0,444	VALID
	X2-2	0.674	0,444	VALID
	X2-3	0.825	0,444	VALID
	X3-1	0.462	0,444	VALID
	X3-2	0.848	0,444	VALID
	X3-3	0.500	0,444	VALID

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan hasil uji validitas, terlihat bahwa semua pernyataan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berjumlah 15 pernyataan semuanya memiliki nilai r hitung > dari nilai r tabel Sehingga untuk variabel akutanbilitas pengelolaan keuangan daerah tidak ada pernyataan yang bermasalah, untuk variabel transparansi laporan keuangan yang memiliki 9 pernyataan masing-masing nilai r hitung yang dihasilkan tidak ada yang lebih kecil dari nilai r tabel sehingga dapat dikatakan bahwa semuanya pernyataan yang ada valid. Untuk variabel penyajian laporan keuangan yang memiliki 12 pernyataan juga tidak memiliki nilai r hitung yang kurang dari r tabel. Sedangkan untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki satu butir yakni nomor X3-1 yang memiliki nilai r hitung sebesar 0,368 hal ini berarti nilai tersebut lebih kecil daripada nilai r tabel sehingga butir pernyataan tersebut tidak bisa di ajukan nantinya untuk sampel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 (Ghozali, 2011:133) yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang.

Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	>/<	Tetapan	Keteragan
Akuntabilitas Pengelolaan	0,996	>	0,7	Reliabel
Trasnparansi Laporan Keuangan	0,984	>	0,7	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan	0,997	>	0,7	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,833	>	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan Tabel IV.7 hasil pengujian dari 22 responden dengan 45 pernyataan menunjukkan bahwa untuk variabel akuntabilitas memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.996 diatas nilai tetapan sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas reliabel. Sedangkan untuk variabel transparansi memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.984 diatas nilai tetapan sebesar 0,7. Variabel penyajian juga memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas nilai tetapan sebesar 0.997.

Untuk variabel aksesbilitas sama dengan variabel lainnya yakni memiliki nilai diatas 0.7 yaitu sebesar 0.833 Hasil ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya dan juga instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal.

2. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan serta menggambarkan karakter sampel dalam penelitian yang mendeskripsikan variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah , sedangkan variabel independen yang digunakan adalah transparansi laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

Tabel IV.8

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	40	60	75	67.05	3.863
Transparansi	40	36	45	39.45	2.124
Penyajian	40	45	59	52.38	3.086
Aksesibilitas	40	29	40	34.65	2.878
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Pada tabel IV.8 menunjukkan hasil pengukuran deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 40 sampel. Tujuan dari analisis statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean),* standar deviasi, nilai *minimum,*nilai *maximum, varian, sum, range, kurtosis,* dan *skewness* (Ghozali, 2013:19). Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukan pada tabel diatas, dapat diketahui nilai *minimum, maximum, mean,* dan standar deviasi masing-masing variabel independen serta variabel dependen.

Adapun penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

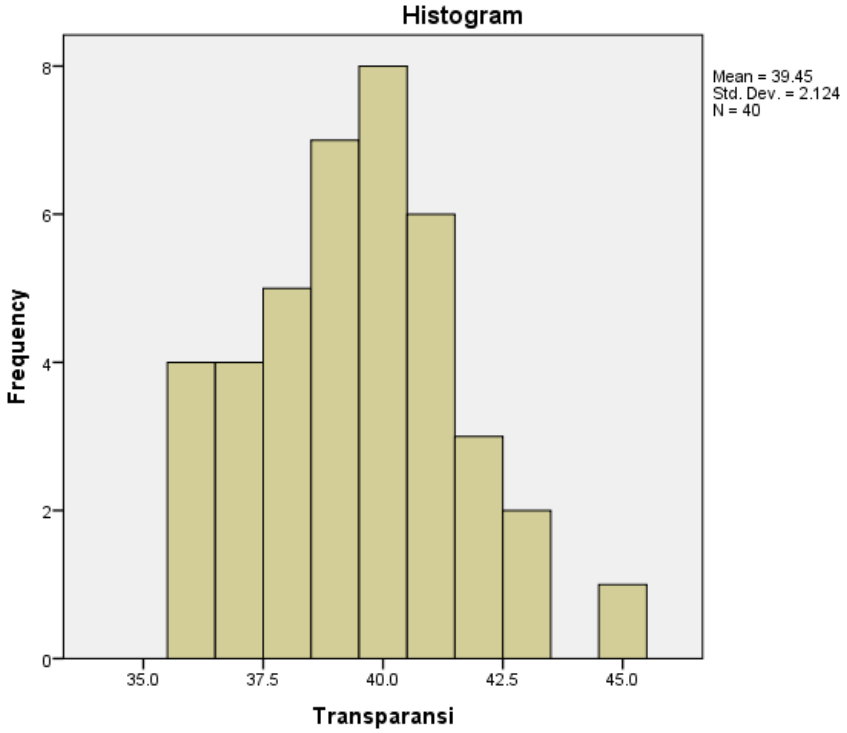

Gambar IV.1 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

a. Variabel Transparansi Laporan keuangan menggunakan 9 butir pernyataan. Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa skor minimum 36, maksimum 45, dan rata-rata sejumlah 39,45 pada variabel independen pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa Transparansi Laporan Keuangan dapat memegaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dilihat pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi untuk total skor minimum 36 ada 4 sampel dengan persentase 10% dan untuk total skor maksimum 45 ada 1 sampel dengan persentase 2.5%. Sedangkan

untuk distribusi frekuensi terbanyak ada di angka total skor 40 dengan 8 sampel dengan persentase 20%. Untuk penilaian indikator mana yang terendah, berdasarkan tabel IV.9 dapat kita ketahui bahwa indikator yang terendah untuk variabel transparansi laporan keuangan adalah indikator Ketersediaan Informasi Kinerja dengan angka 507. Sedangkan untuk yang tertinggi yaitu indikator Keterbukaan dan Kepatuhan Pemerintah dengan nilai 546. Hal ini berarti Ketersediaan Informasi Kinerja masih harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Depok.

Tabel IV.9

Hasil Penilaian Per Indikator Transparansi Laporan Keuangan

No.	Indikator	Nilai Total Per Pernyataan	Nilai Total Per Indikator
1	Keterbukaan dan Kepatuhan Pemerintah	187	546
		184	
		175	
2	Publikasi laporan keuangan daerah	171	525
		187	
		167	
3	Ketersediaan informasi kinerja	168	507
		168	
		171	

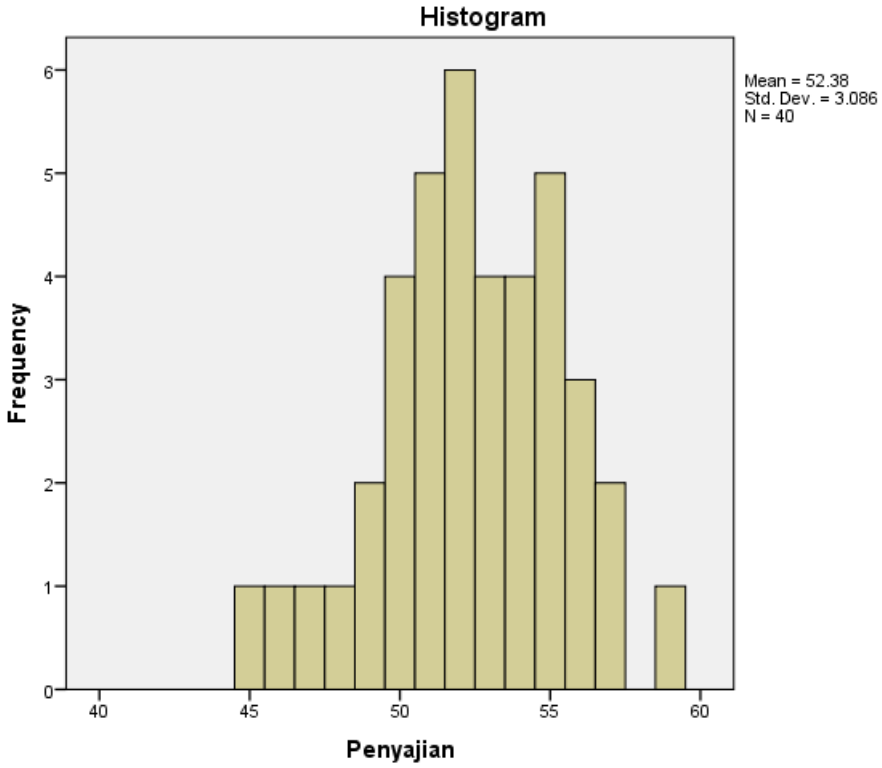

Gambar IV.2 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Penyajian

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018

b. Variabel Penyajian Laporan Keuangan menggunakan 12 butir pernyataan. Skor minimum 45, maksimum 59, dan rata-rata sejumlah 52.38 pada variabel independen kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyajian Laporan Keuangan dapat memegaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dilihat pada gambar IV.2 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi untuk total skor minimum 45 ada 1 sampel dengan persentase 2.5% dan untuk total skor maksimum 59 ada 1 sampel dengan persentase 2.5%. Sedangkan untuk distribusi frekuensi

terbanyak ada di angka total skor 52 dengan 6 sampel. Untuk penilaian indikator mana yang terendah, berdasarkan tabel IV.10 dapat kita ketahui bahwa indikator yang terendah untuk variabel transparansi laporan keuangan adalah indikator Dapat Dibandingkan dengan angka 518. Sedangkan untuk yang tertinggi yaitu indikator Relevan dengan nilai 528. Hal ini berarti penyajian laporan keuangan Kota Depok masih harus ditingkatkan lagi agar dapat dibandingkan.

Tabel IV.10

Hasil Penilaian Per Indikator Penyajian Laporan Keuangan

No.	Indikator	Nilai Total Per Pernyataan	Nilai Total Per Indikator
1	Relevan	174	528
		177	
		177	
2	Andal	176	524
		174	
		174	
3	Dapat Dibandingkan	172	518
		171	
		175	
4	Dapat Dipahami	175	525
		174	
		176	

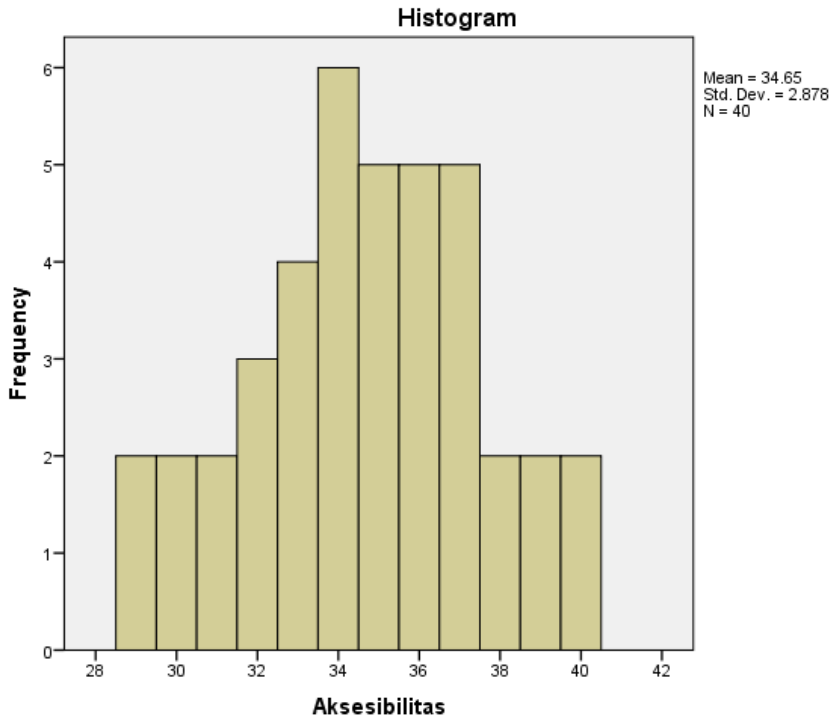

Gambar IV.3 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Aksesbilitas

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

c. Variabel Aksesibilitas Laporan keuangan menggunakan 8 butir pernyataan. Skor minimum 29, maksimum 40, dan rata-rata sejumlah 34.65 pada variabel independen ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan dapat memegaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dilihat pada gambar IV.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi untuk total skor minimum 29 ada 2 sampel dengan persentase 5% dan untuk total skor maksimum 40 ada 2 sampel dengan persentase 5%. Sedangkan untuk distribusi frekuensi

terbanyak ada di angka total skor 34 dengan 6 sampel. Untuk penilaian indikator mana yang terendah, berdasarkan tabel IV.11 dapat kita ketahui bahwa indikator yang terendah untuk variabel transparansi laporan keuangan adalah indikator Keterbukaan dengan nilai 342. Sedangkan untuk yang tertinggi yaitu indikator *Accessible* dengan nilai 523. Hal ini berarti aksesibilitas laporan keuangan Kota Depok masih harus ditingkatkan lagi keterbukaannya dikarenakan dari semua indikator yang ada, Keterbukaanlah yang paling kecil.

Tabel IV.11

Hasil Penilaian Per Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

No.	Indikator	Nilai Total Per Pernyataan	Nilai Total Per Indikator
1	Keterbukaan	170	342
		172	
2	Kemudahan	175	521
		171	
		175	
3	*Accessible*	174	523
		175	
		174	

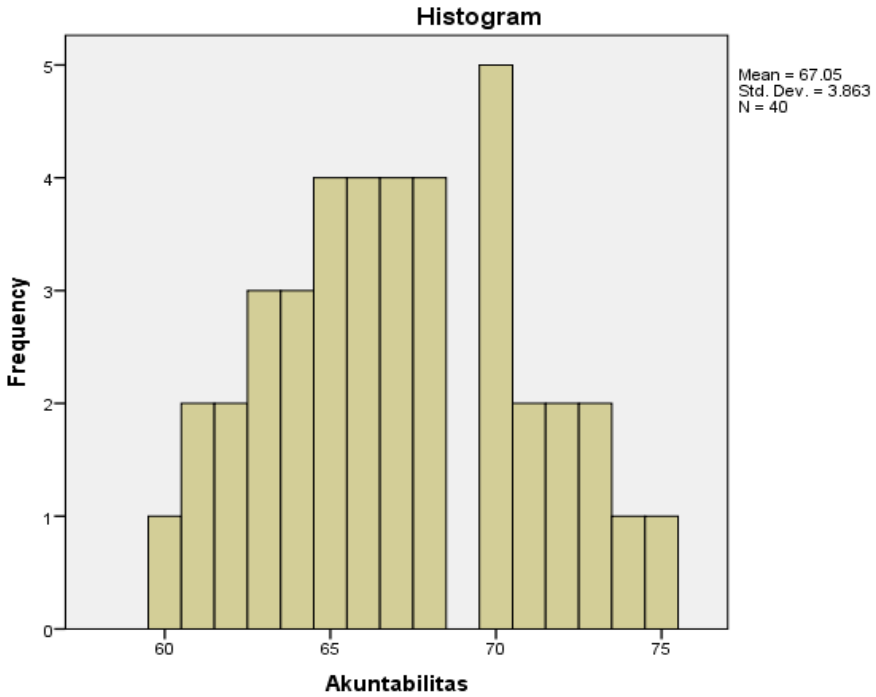

Gambar IV.4 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

d. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan 15 butir pernyataan. Skor minimum 60, maksimum 75, dan rata-rata sejumlah 67.5 pada variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sangat dibutuhkan untuk menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dilihat pada gambar IV.4 Dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi untuk skor minimum 60 ada 1 sampel dengan persentase 2.5% dan untuk skor maksimum 75 ada 1 sampel dengan persentase 2.5%. Sedangkan untuk distribusi frekuensi terbanyak ada di angka 70 dengan 5 sampel

dengan persentase 12.5%. Untuk penilaian indikator mana yang terendah, berdasarkan tabel IV.12 dapat kita ketahui bahwa indikator yang terendah untuk variabel transparansi laporan keuangan adalah indikator Pelaporan dengan nilai 506. Sedangkan untuk yang tertinggi yaitu indikator Perencanaan dengan nilai 580. Hal ini pelaporan Kota Depok masih harus ditingkatkan lagi dikarenakan dari semua indikator yang ada, indikator pelaporan memiliki nilai yang paling kecil.

Tabel IV.12

Hasil Penilaian Per Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator	Nilai Total Per Pernyataan	Nilai Total Per Indikator
1	Perencanaan	199	580
		195	
		186	
2	Pelaksanaan	181	527
		178	
		168	
3	Pelaporan	168	506
		170	
		168	
4	Pertanggungjawaban	171	536
		180	
		185	
5	Pengawasan	177	533
		178	
		178	

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal.

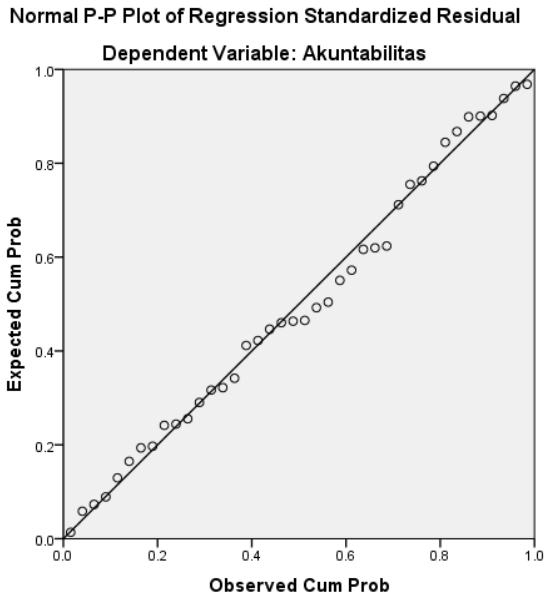

Gambar IV.5

Hasil Ui Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Gambar IV.5 menunjukan data yang berada di sekitar garis diagonal cenderung mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mendapatkan data yang dapat meyakinkan, hasil uji grafik pada uji normalitas ini juga dilengkapi dengan uji statistik dengan menggunakan uji Komogorov-Smirnov (K-S). Analisis ini merupakan suatu pengujian normalitas secara univariate untuk menguji keselarasan data masing-masing variabel penelitian, dimana suatu sampel dikatakan berdistribusi normal atau tidak data yang berdsitribusi normal ditunjukan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5%.

Tabel IV.13

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07971488
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.058
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Hasil pengujian normalitas pada pengujian Kolmogorov-Smirnov yang dapat dilihat pada tabel IV.13 diatas menunjukan signifikan diatas 0.05 dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200. Hal tersebut mengindikasikan data residual terdistribusi secara normal, karena memiliki nilai signifikansi diatas 0.05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya masalah tersebut, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel IV.14
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.725	1.380
	Penyajian	.626	1.597
	Aksesibilitas	.623	1.605

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan tabel IV.14 sesuai dengan standar nilai *tolerance* varabel independen > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Variabel Transparansi Laporan Keuangan menghasilkan *tolerance* sebesar 0.725 dan nilai VIF sebesar 1.380. Variabel Penyajian Laporan Keuangan menghasilkan *tolerance* sebesar 0.626 dan nilai VIF sebesar 1.597. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan menghasilkan *tolerance* sebesar 0.623 dan nilai VIF sebesar 1.605. Seluruh variabel telah memenuhi *cut off* untuk *tolerance value* dan

VIF. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan dan diolah bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen dan model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari resiudal suatu pengamatan ke pengamtan lain. Menguji data heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplots.* Grafik yang tidak terdapat heteroskedastisitasnya adalah data dengan plot yang menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

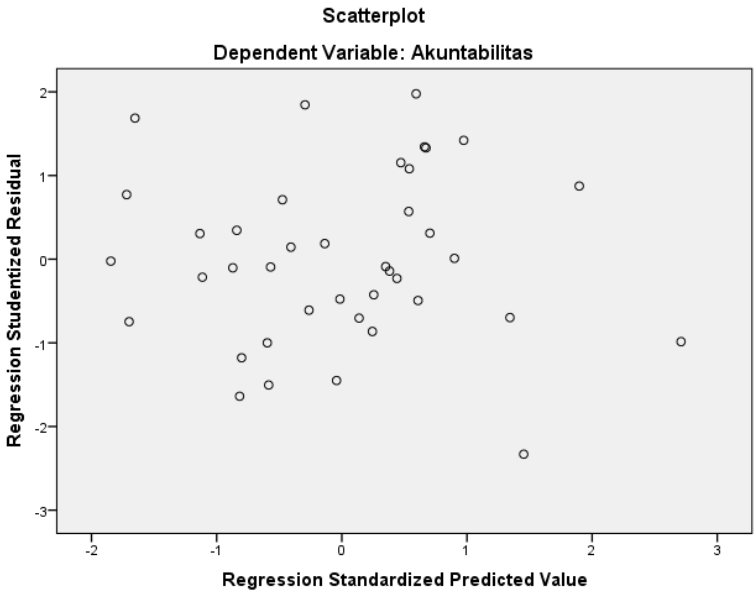

Gambar IV.6 *Scatterplot*

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Analisis dengan menggunakan scatterplots memiliki kelemahan yang cukup signifikan sehingga diperlukan untuk uji

statistik agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini makan dilakukan uji glesjer.

Tabel IV.15 Hasil Uji *Glesjer*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.029	4.249		-.478	.636
	Transparansi	.026	.113	.044	.230	.819
	Penyajian	.005	.083	.012	.060	.952
	Aksesibilitas	.069	.090	.159	.769	.447

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan hasil uji gletsjer pada tabel IV.15 dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05 untuk setiap variabel yaitu Transparansi Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi 0,819 dan variabel Penyajian Laporan keuangan memiliki nilai signifikansi 0,952 serta variabel Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi 0,447.

4. Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan

variabel beberapa variabel independen dalam suatu prefektif tunggal. Uji berganda ini dapat dilihat berdasarkan tabel *coefficients.*

Tabel IV.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.599	7.234		.359	.721
	Transparansi	.601	.192	.330	3.135	.003
	Penyajian	.550	.142	.439	3.874	.000
	Aksesibilitas	.345	.153	.257	2.259	.030

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Tabel IV.16 menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel independen secara berturut-turut adalah variabel Transparansi Laporan keuangan sebesar 0,601; Penyajian Laporan Keuangan sebesar 0,550; dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0,345. Sehingga persamaan regresi pada penelitian ini menjadi:

$$\mathbf{Y = 2{,}599 + 0{,}601TLK + 0{,}550PLK + 0{,}345ALK + \varepsilon}$$

Dalam hal ini:

Y = Akutanbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

TLK= Sistem Informasi Akuntansi PLK= Kerjasama Tim

ALK = Pengendalian Internal ε = error yang ditolerir (5%)

Berikut penjelasan mengenai analisis regresi berganda yaitu:

a. Nilai Konstanta menunjukkan angka sebesar 2,599 memiliki arti bahwa setiap variabel independen yang terdri dari Transparansi Laporan keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan bernilai konstan maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat sebesar 2,975.
b. Koefisien regresi variabel Transparansi Laporan Keuangan sebesar 0,601. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Transparansi Laporan Keuangan mengalami kenaikan satu maka nilai variabel Transaparansi Laporan Keuangan akan bertambah 0,601.
c. Koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan sebesar 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Penyajian Laporan Keuangan mengalami kenaikan satu maka nilai variabel Penyajian Laporan Keuangan akan bertambah 0,550.
d. Koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0,345. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Aksesibilitas Laporan keuangan mengalami kenaikan satu maka nilai variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan akan bertambah 0,345.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel yang dependen dimasukkan ke dalam model dan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifiksnsi 0,05. Dapat dihitung untuk t tabel = (t tabel = (α÷2 ; n-k-1) = (0,05÷2 ; 40-3-1) = (0,025 ; 36), dimana α adalah persentase eror, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel, apabila dicari pada distribusi nilai t tabel maka ditemukan nilai t tabel sebesar 2.02809.

a. Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian pada tabel IV.16 dapat terlihat bahwa variabel Transparansi Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi 0,003 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 dan diperkuat oleh hasil t hitung sebesar 3.135 dimana lebih tinggi dari pada t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan dapat dikatakan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi Laporan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini berarti jika Transparansi Laporan Keuangan Daerah ditingkatkan maka

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh Dewi (2016).

b. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian pada tabel IV.16 dapat terlihat bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 dan diperkuat oleh hasil t hitung sebesar 3.874 dimana lebih tinggi dari pada t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan dapat dikatakan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana jika penyajian laporan keuangan dinaikan satu sedangkan variabel yang lainnya tetap maka akan menyebabkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah naik sebesar 0,550%. Hasil penelitian ini didukung oleh Dewi (2016) dan Sumiyati (2015).

c. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian tabel IV.16 dapat terlihat bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi 0,030 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 dan diperkuat oleh hasil t hitung sebesar 2.259 dimana lebih tinggi dari pada t tabel yang sebesar

2.02809 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan dapat dikatakan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana jika penyajian laporan keuangan dinaikan satu sedangkan variabel yang lainnya tetap maka akan menyebabkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah naik sebesar 0,345%. Hal ini menunjukan bahwa terciptanya Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berdampak baik bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Sumiyati (2015) dan Lily (2015).

6. Uji Statistik F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: transparansi laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap satu variabel dependen yaitu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dan diatas nilai f_{tabel} untuk n=40 sebesar 2,87 (Ghozali, 2013).

1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel IV.17 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	413.217	3	137.739	29.396	.000[b]
	Residual	168.683	36	4.686		
	Total	581.900	39			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Transparansi, Penyajian

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel IV.17 didapat nilai F hitung sebesar 29,396 dengan tingkat signifikansi 0,000 hal ini berarti bahwa F hitung lebih tinggi dari pada F tabel sebesar 2,87 dan signifikasi dibawah 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain Transparansi Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843[a]	.710	.686	2.165

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Transparansi, Penyajian

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, IBM SPSS 24. 2018.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel IV.18 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,686 atau 68,6% yang berarti transparansi laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 68,5%. Sedangkan sisanya 31,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang meliputi penerapan sistem keuangan daerah, aktivitas pengendalian, *value for money* dan pengendalian internal.

D. Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan 40 responden dari 20 dinas, yang masing-masing dinas diwakili oleh 2 responden yaitu Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Keuangan Dinas.

Pembahasan untuk masing – masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian dapat terlihat bahwa Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Transparansi Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Dewi (2016) dimana transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Noordiawan (2010:42) transparansi laporan keuangan daerah berarti keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator dalam mengukur transparansi menurut Loina (2003:16) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan Kepatuhan Pemerintah, yaitu ada tidaknya penyediaan informasi yang jelas kepada publik dan kepatuhan akan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Publikasi laporan keuangan daerah, dimana pemerintah mempublikasikan laporan keuangan daerahnya melalui *website* pemerintah daerah masing-masing maupun media cetak/elektronik.

3. Ketersediaan Informasi Kinerja, yaitu ketersediaan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun akivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai "watchdog" atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Loina,2003:15).

2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian dapat terlihat bahwa Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Dewi (2016) dimana penyajian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Sumiyati (2015) yang menyatakan

bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan Nurlaili (2016), penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan seusai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transpaansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:159) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan .

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Penyajian laporan keuangan daerah juga harus memperhatikan hal-hal yang sudah diatur ketentuannya agar tidak terjadi kesalahan penyajian dan laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu memerlukan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan dengan memperhatikan pos-pos yang sudah diatur oleh Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Daerah

Pada hasil uji hipotesis penelitian dapat terlihat bahwa Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Penyajian

Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya dengan terciptanya aksesibilitas laporan keuangan berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut Lily (2015), aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sumiyati (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk di dengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak pubik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. hak publik atas inforasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) (Mardiasmo, 2002: 171).

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian untuk tercapainya aksesibilitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus memenuhi syarat antara lain (Sumiyati, 2015) :

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa
2. Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi keuangan daerah

3. *Accessible* (dapat diakses) yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Masalah yang kemudian timbul adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksibel dapat menurunkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Wahyuni, 2014).